

DINAMIKA PARTAI POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BANTUAN KEMANUSIAAN INDONESIA KE ROHINGYA TAHUN 2017

Abdul Halim¹, Khairunnas²

¹*Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia*

²*Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia*

SUBMISSION TRACK

Received: 18 Januari 2021
Final Revision: 21 April 2021
Available Online: 31 Juni 2021

KEYWORD

Rohingya, Humanitarian Crisis,
Indonesia, Humanitarian
Assistance, Political Parties

KATA KUNCI

Rohingya, Krisis Kemanusiaan,
Indonesia, Bantuan Kemanusiaan,
Partai Politik

CORRESPONDENCE

Email : abdul.halim@fisip.unsri.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is the first and only country that can open space for dialogue and access to humanity in the conditions of the humanitarian crisis in 2017. Indonesia's achievements cannot be separated from the domestic pressure that has occurred in Indonesia to pressure the government to take responsive action. The humanitarian crisis is getting worse. and the common identity of the Indonesian Muslim community and the Rohingya. One of the domestic demands was voiced by political parties in Indonesia. This study aims to see how the dynamics that occur in Indonesia in the decision-making of Indonesian humanitarian aid to the Rohingya. This study used a descriptive qualitative method with a literature database supported by policy influencers theory focused on parties' influences. The findings of this study indicate that political parties in Indonesia are divided into two ideas in responding to the humanitarian crisis problem of the Rohingya ethnicity, some focus on providing humanitarian assistance and some focus on Indonesian firm action against the Myanmar government.

ABSTRAK

Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang dapat membuka ruang dialog dan akses kemanusiaan pada kondisi krisis kemanusiaan tahun 2017. Capaian Indonesia ini tidak bisa lepas dari desakan domestik yang terjadi di Indonesia untuk menekan pemerintah agar dapat melakukan tindakan yang responsif krisis kemanusiaan semakin parah terjadi dan kesamaan identitas masyarakat muslim Indonesia serta Rohingya. Desakan domestik ini salah satunya disuarakan oleh partai politik yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika yang terjadi di Indonesia dalam pengambilan kebijakan bantuan kemanusiaan Indonesia ke Rohingya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan basis data literatur yang ditunjang dengan teori *policy influencers* yang difokuskan pada *parties influences*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia terbagi dalam dua ide besar dalam menanggapi persoalan krisis kemanusiaan etnis Rohingya, ada yang berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan dan ada yang berfokus pada Tindakan tegas Indonesia terhadap pemerintah Myanmar.

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan Etnis Rohingya menyebabkan krisis pengungsi bagi penduduk Rohingya, situasi yang demikian menyebabkan kasus tersebut menjadi perbincangan hangat di berbagai negara sebagai krisis kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dunia. Pada Agustus 2017, konflik terjadi ketika ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) menyerang pangkalan militer Myanmar di Wilayah Rakhine. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 konflik berlanjut dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap Etnis Rohingya (Albayumi, Hadi, & Susilo, 2017).

Di Indonesia krisis kemanusiaan yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar secara masif mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat, hal ini disebabkan selain persoalan krisis kemanusiaan tersebut keberadaan Etnis Rohingya sebagai etnis muslim yang menjadi penduduk minoritas di Myanmar juga menjadi isu yang dominan diperbincangkan. Isu tersebut tentu bergulir sangat cepat di masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia. Berkembangnya isu tersebut juga memunculkan desakan dan gelombang protes dari sejumlah organisasi-organisasi

kemasyarakatan yang ada di Indonesia, yang selanjutnya aksi-aksi tersebut mendorong pemerintahan Republik Indonesia untuk mengambil sikap dan menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk krisis yang dialami oleh Etnis Rohingya di Myanmar. Puncaknya, Kementerian Luar Negeri bersama sejumlah Ormas berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat di Rakhine State. Adapun empat prioritas bantuan yang diberikan Indonesia kepada etnis Rohingya adalah edukasi, kesehatan, dan ekonomi serta bantuan dasar. Beberapa ormas yang tergabung dalam aliansi itu seperti Muhammadiyah, Dakwal wal Irsyad (DDII), Al Irsyad, Mathlaul Anwar, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), dan Ikadi (Prihantoro, 2021).

Aksi dan sikap dari Kemenlu dan sejumlah ormas tidak bisa dilepaskan dari desakan sejumlah partai politik di Indonesia yang menyuarakan sikap terkait krisis kemanusiaan yang di alami oleh Etnis Rohingya di Myanmar. Sejumlah sikap tersebut secara tegas meminta sikap resmi dari pemerintah Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke negara tersebut. Sejumlah partai politik di parlemen juga mendesak agar pemerintah Indonesia juga mengambil langkah-langkah diplomasi di asosiasi kawasan untuk mendorong penyelesaian konflik kemanusiaan yang terjadi. Sikap yang

ditunjukkan oleh sejumlah partai politik tersebut menjadi penting mengingat masifnya isu krisis kemanusiaan Etnis Rohingya di tengah masyarakat, dan sebagai negara demokrasi memang sudah semestinya partai politik menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik (Budiardjo, 2008).

KERANGKA TEORI

Konsep peran politik domestik akan melihat apa saja yang menjadi faktor yang berpengaruh dan sejauh apa pengaruh yang diberikan dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara dengan menggunakan konsep yang dijelaskan oleh William D. Coplin dalam buku *Introduction to International politics*. Coplin mencoba untuk menjelaskan sebuah konsep yang dikenal dengan *Policy Influencers*. *Policy Influencers* merupakan aktor yang mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Dalam tatanan domestik, ada empat faktor yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan luar negeri yang akan diambil. Empat faktor tersebut meliputi *Bureaucratic Influencers*, *Partisan Influencers*, *Interest Influencers*, *Mass Influencers*. Salah satu indikator yang paling berpengaruh adalah *Partisan Influencers*. *Partisan Influencers* dapat diartikan sebagai partai yang mempengaruhi. Kelompok ini memiliki tujuan untuk menerjemahkan tuntutan-

tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politik. Tuntutan ini kemudian diteruskan kepada para pengambil kebijakan yang kemudian dapat dijadikan kebijakan yang mampu diimplementasikan kepada masyarakat. Upaya *influencers* ini dalam mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah adalah dengan menekan para penguasa dan menyediakan personil-personil yang dapat berperan dalam pengambilan kebijakan. Kemampuan *partisan influencers* dalam sistem politik terbuka untuk konteks pembentukan politik luar negeri cenderung terbatas. Keterbatasan ini berangkat dari asumsi bahwa *partisan influencers* lebih menitikberatkan pada persoalan politik domestik dibandingkan dengan persoalan politik luar negeri. Kompleksitas isu politik luar negeri yang membutuhkan para ahli dalam penyelesaian dan penentuan kebijakan luar negeri yang harus diambil semakin menggeser peran *partisan influencers* dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri (Coplin, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan data-data yang didapat berupa tulisan ilmiah, pemberitaan media masa, laporan pemerintah dan gambaran aksi dan tindakan yang tergambar di dalam tulisan-tulisan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif

analisis di mana analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat menjadi lebih rinci (Iskandar, 2008) Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada *Literature Research*. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder berupa data-data yang membahas mengenai tiap partai politik dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dalam pengambilan kebijakan bantuan kemanusiaan ke etnis Rohingya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai politik merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politik. Tuntutan ini kemudian diteruskan kepada para pengambil kebijakan yang kemudian dapat dijadikan kebijakan yang mampu diimplementasikan kepada masyarakat. Upaya *influencers* ini dalam mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah adalah dengan menekan para penguasa dan menyediakan personil-personil yang dapat berperan dalam pengambilan kebijakan (Coplin, 2003). Bagian ini akan menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh partai politik dalam mengartikulasikan persoalan krisis kemanusiaan di Myanmar agar mampu diperhatikan dan di terjemahkan menjadi tindakan pemerintah dalam bentuk

kebijakan yang konkret. Bagian ini akan melihat pengaruh yang diberikan oleh sepuluh partai politik yang memiliki suara di parlemen yang didasarkan pada hasil pemilu 2014. Sepuluh partai politik tersebut meliputi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Nasdem dan Hanura (Zulfikar, 2018).

PDI Perjuangan

PDI Perjuangan adalah partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak dalam pemilu 2014. Menanggapi persoalan krisis kemanusiaan di Rakhine, PDI Perjuangan melalui Sekjennya Hasto Kristiyanto menyampaikan desakan kepada pemerintah untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan dan langkah diplomasi terkait persoalan yang sedang terjadi. PDI Perjuangan juga menyampaikan kecaman terhadap tindakan yang sangat tidak manusiawi tersebut serta memberikan dukungan kepada pemerintah dalam hal ini Menlu yang bertindak cepat dan segera berangkat ke Myanmar untuk membantu penyelesaian persoalan ini. Harto juga menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN harus mengambil inisiatif untuk mewujudkan perdamaian sesuai dengan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dan atas dasar sila kedua Indonesia yakni kemanusiaan yang adil yang beradab. Hal tersebut menjadi landasan yang kuat untuk

Indonesia berkontribusi cepat dalam menghentikan kekerasan yang terjadi (Liputan6, 2018). Selain itu, PDI Perjuangan akan ikut ambil bagian dalam gerakan solidaritas sebagai kekuatan moral untuk mencegah kekerasan yang lebih parah yang terjadi di Rakhine (Ihsanuddin, 2018).

Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golkar menyampaikan keprihatinan terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine. Keprihatinan yang disampaikan juga dibarengi dengan tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam membantu penyelesaian persoalan ini. Hal ini disampaikan oleh Sekjen partai Golkar Idrus Marham di kantor DPP Golkar, Slipi Jakarta pada Senin 4 September 2017. Pernyataan sekjen Golkar tersebut adalah sebagai berikut (Ronald, 2018):

"Sebagai negara berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta secara konstitusional sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945, untuk senantiasa aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka sudah seharusnya Indonesia melakukan langkah-langkah konkret dan nyata. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran dan pengaruh penting di kawasan ASEAN,"

Pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen Golkar tersebut berimplikasi pada desakan terhadap pemerintah untuk melakukan langkah konkret dan nyata untuk membantu persoalan yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Hal ini didasarkan pada beberapa aspek meliputi landasan Pancasila yang didasarkan pada pengakuan harkat dan martabat kemanusiaan serta Indonesia yang merupakan negara yang memiliki peran dan pengaruh yang besar dan penting di kawasan ASEAN. Dua hal tersebut menjadi landasan kuat bagi partai Golkar untuk mendesak pemerintah melakukan suatu tindakan dalam merespons persoalan yang sedang terjadi di Myanmar.

Selain paparan yang disampaikan oleh Sekjen, partai Golkar juga menyampaikan pernyataan sikap yang berisi sembilan poin kesepakatan partai Golkar untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Rakhine. Sembilan poin tersebut peneliti lampirkan pada lampiran III. Isi dari pernyataan sikap tersebut yang relevan dengan penelitian ini untuk melihat pengaruh partai politik dalam pengambilan kebijakan bantuan kemanusiaan terhadap Myanmar ada pada poin ketiga yakni mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Poin kesembilan Partai Golkar menyampaikan kesiapan

untuk ikut serta memberikan bantuan melalui instruksi yang disampaikan kepada keluarga besar partai Golkar untuk memberikan bantuan kemanusiaan melalui Dompot Tragedi kemanusiaan Rohingya Partai Golkar (Ronald, 2018). Poin-poin lainnya yang dipaparkan oleh partai Golkar lebih menekankan pemerintah untuk melakukan kerja sama intra-kawasan dan global serta meminta keterlibatan PBB dalam masalah ini. Selain itu, Golkar juga menyampaikan usulan sikap pemerintah Indonesia jika pemerintah Myanmar tidak kooperatif dalam penyelesaian persoalan ini. Tambahan lain, partai Golkar menyampaikan bahwa tragedi kemanusiaan di Myanmar merupakan sebuah pelajaran agar tidak terjadi di Indonesia.

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Partai Gerindra dalam temuan peneliti tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi kebijakan bantuan kemanusiaan Indonesia ke Rohingya. Partai Gerindra lebih menekankan pada sikap Indonesia lebih tegas dalam menanggapi persoalan ini. Wakil Sekjen Gerindra Andre Rosiade menyampaikan bahwa Pemerintah harus menarik Duta besar RI untuk Myanmar dan memulangkan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia sebagai bentuk protes atas tindakan pemerintah Myanmar terkait persoalan etnis Rohingya. Selain itu,

Andre juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo harus menginisiasi dikeluarkannya Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Andre juga menyampaikan bahwa Indonesia perlu mengirim pasukan keamanan dalam payung PBB dan mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi sebagai bentuk hukuman bagi Myanmar (Okezone, 2018).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh partai Gerindra terkait persoalan Myanmar, melalui akun Twitter resmi partai Gerindra yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia harus tegas mengambil inisiatif dengan menggalang negara-negara lain untuk membantu pengungsi serta menekan pemerintah otoriter Myanmar untuk menghentikan pembantaian kepada muslim Rohingya. Gerindra dalam akun resmi Twiternya juga menyebutkan bahwa Indonesia tidak mampu berbuat banyak untuk mengubah kondisi yang ada tanpa bantuan dari berbagai negara. Selain itu, Partai Gerindra juga menyampaikan bahwa pemerintah harus menjalankan amanat UUD 1945 dengan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Gerindra, 2018).

Tambahan lain disampaikan oleh pengurus DPP Gerindra yakni Meireza Endipar Wijaya pada tanggal 7 September 2017 menyebutkan bahwa ketua umum dan

dewan pembina partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran di bawah untuk terlebih dahulu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat muslim Rohingya di Rakhine. Setelah melakukan investigasi barulah partai Gerindra dapat menentukan sikap dan menyampaikannya kepada pemerintah (Putra, 2018). Sikap ini terkesan lamban, dari penelusuran peneliti, hingga kebijakan bantuan kemanusiaan Indonesia dilakukan partai Gerindra tidak memberikan rekomendasi atau penentuan sikap.

Partai Demokrat

Partai demokrat dalam kasus krisis kemanusiaan di Rakhine lebih menekankan pada peran aktif Indonesia untuk merangkul negara-negara tetangga guna membentuk kerja sama oleh negara-negara kawasan ASEAN untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Hal ini disampaikan oleh ketua Umum partai demokrat yang merupakan mantan presiden RI yang keenam yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kuala Lumpur pada 2 September 2017 yang memaparkan bahwa apa yang dilakukan oleh presiden Jokowi dan Menlu sudah melakukan pernyataan yang bagus. Namun SBY menambahkan bahwa Pemerintah harus mengambil prakarsa bersama pemimpin lain untuk mengakhiri pembunuhan etnis Rohingya di Myanmar (Liputan6, 2018).

Sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh ketua umum partai Demokrat, ketua divisi pengembangan kemitraan masyarakat DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf yang meminta peran aktif pemerintah Indonesia untuk mengatasi konflik kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Peran aktif pemerintah Indonesia yang dimaksud oleh Partai demokrat adalah dengan mengajak ASEAN untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi dengan landasan bahwa Indonesia adalah *Big Brother* di kawasan ASEAN. Argumentasi yang dipaparkan di atas, berangkat dari konteks tindakan Indonesia di zaman kepemimpinan SBY yang mencoba merangkul negara-negara ASEAN untuk berperan bersama dalam penyelesaian persoalan Rohingya di periode sebelumnya (Medistiara, 2018).

Dua pernyataan yang sejalan yang dipaparkan oleh dua orang petinggi partai demokrat dalam menanggapi persoalan krisis kemanusiaan di Rakhine terhadap etnis Rohingya lebih menekankan pada peran pemerintah Indonesia sebagai negara besar dan negara yang memiliki pengaruh di ASEAN untuk dapat berkontribusi menyelesaikan persoalan ini dengan mengajak pemimpin negara lain untuk bekerja sama dalam konteks penyelesaian persoalan ini. Relevansi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partai

Demokrat lebih menekankan pada pendekatan kerja sama untuk menekan pemerintah Myanmar dalam penyelesaian krisis kemanusiaan. Partai demokrat tidak menekankan pada bantuan kemanusiaan yang harus diberikan pada korban krisis kemanusiaan.

Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) bertindak lebih agresif dengan menekankan pada peran pemerintah untuk mengusir duta besar Myanmar untuk Indonesia sebagai reaksi tegas dalam menanggapi persoalan krisis kemanusiaan yang terjadi. Hal ini disampaikan oleh koordinator aksi Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BMPAN) Thomas Warijo pasca aksi protes yang dilakukan di depan kedutaan besar Myanmar di Jakarta. Dalam pemaparannya, Thomas menyampaikan bahwa Dubes Myanmar untuk Indonesia harus angkat kaki dari Indonesia untuk menyelesaikan masalah pembantaian yang telah melanggar HAM di negaranya. Desakan ini disampaikan untuk pemerintah agar segera melakukan pengusiran sebagai bentuk langkah konkret Indonesia yang benar fokus pada isu kekerasan etnis (Sutari, 2018). PAN lebih menekankan pada aksi negara untuk memberikan hukuman pada Myanmar. Hal ini tidak berpengaruh pada pola penelitian ini dalam melihat desakan partai politik sebagai bagian dari kelompok

yang memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan bantuan kemanusiaan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui kader partainya yang duduk di DPR RI sekaligus ketua Fraksi PKB di DPR RI yakni Ida Fauziyah menyampaikan sikap tegas dari PKB dengan mengutuk tindakan kekerasan dan pembantaian terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Ida juga menyampaikan bahwa PKB mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan tegas dan membangun diplomasi yang efektif untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan baik melalui PBB maupun ASEAN (Prastiwi, 2018). Sejalan dengan yang disampaikan oleh kader partai, ketua umum PKB Muhaimin Iskandar di Vihara Dharma Bakti pada 3 September 2017 menyampaikan bahwa PKB mendesak pemerintah Indonesia untuk menekan pemerintah Myanmar agar dapat membuka akses bantuan kemanusiaan ke Rohingya agar bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan kepada kelompok yang membutuhkan. Selain itu, PKB juga meminta agar PBB dapat segera membuat *fact finding* terkait persoalan yang sedang terjadi (Ismail, 2018). pada kesempatan yang sama di acara yang bertajuk “Rohingya adalah Kita” ketua umum juga menyampaikan bahwa PKB akan

berkontribusi nyata dalam pemberian bantuan ke etnis Rohingya. Kontribusi nyata yang akan digadag oleh PKB adalah dengan menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk menggalang dana yang diambil dari gaji para kader dan pegawai PKB (Tempo, 2018).

Tindakan yang dilakukan oleh PKB bukan hanya menekan pemerintah untuk melakukan hal konkret dalam bantuan kemanusiaan ke etnis Rohingya dengan membuka ruang kemanusiaan, akan tetapi PKB juga bergerak dengan menggalang dana untuk memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat perbaikan kondisi bagi para korban konflik etnis yang terjadi di Rakhine State. Dua hal ini menjadi pengaruh dalam pertimbangan kebijakan bantuan kemanusiaan Indonesia ke Rohingya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Awal eskalasi konflik di Rakhine State mulai terpantau media internasional. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyampaikan sikap awal terkait persoalan ini. Melalui ketua Fraksi PKS di DPR RI yakni Jazuli Juwaini di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 Agustus 2017 menyampaikan bahwa Krisis kemanusiaan yang terjadi Di Rakhine merupakan tanggung jawab kemanusiaan universal dan kita semua bertanggungjawab

untuk menghentikannya karena ini merupakan duka dunia. Beliau juga menambahkan bahwa Fraksi PKS akan menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Rohingya di parlemen dan mendorong pemerintah RI untuk dapat melakukan diplomasi multitrack yang dilakukan melalui Kementerian luar negeri. PKS juga menegaskan akan menggunakan berbagai saluran dan kewenangan yang dimiliki guna membantu penyelesaian persoalan ini (Aulia, 2018).

Pemaparan yang dilakukan oleh ketua Fraksi PKS di DPR ditindaklanjuti oleh pengurus PKS dengan mengeluarkan pernyataan sikap DPP PKS terkait persoalan yang terjadi. Dilansir dari website resmi PKS, pernyataan sikap dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh PKS meliputi empat poin yang ditanda tangani langsung oleh Presiden dan sekjen PKS. Empat poin tersebut meliputi (PKS, 2018):

1. PKS mengutuk sekeras-kerasnya pembersihan suku (*ethnic cleansing*) terhadap etnis Rohingya di Rakhine State oleh militer Myanmar;
2. Mengapresiasi masyarakat yang sudah berinisiatif memberikan berbagai bentuk pembelaan dan bantuan langsung maupun tidak langsung serta mengajak untuk terus

aktif memberikan dukungan terbaik untuk etnis Rohingya;

3. Mendesak Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan negara ASEAN terbesar, untuk bertindak lebih nyata dalam upaya menghentikan pembersihan etnis melalui jalur bilateral dan multilateral melalui ASEAN, OKI, dan PBB dengan agenda utama menyelamatkan warga sipil yang tidak bersenjata dan memulihkan kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai bagian integral dari Negara Myanmar yang lebih demokratis;
4. Menginstruksikan Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan untuk memperkuat langkah-langkah Indonesia dalam upaya melindungi dan mencegah etnik Rohingya dari bahaya *ethnic cleansing* dan *genocide*.

Empat poin yang dipaparkan melalui pernyataan sikap dan rencana aksi oleh DPP PKS yang relevan dengan penelitian ini adalah pada poin ketiga dan keempat. Di Poin ketiga DPP PKS

mendesak Presiden RI untuk melakukan tindakan dan upaya yang lebih nyata dalam penyelesaian persoalan ini dengan menggunakan jalur diplomasi baik bilateral maupun multilateral. Poin keempat lebih menekankan pada penguatan internal PKS untuk membantu pemerintah dalam melakukan percepatan dalam penyelesaian persoalan yang sedang terjadi. Presiden PKS Sohibul Iman juga menambahkan rencana aksi strategis yang dapat dilakukan oleh presiden Joko Widodo untuk membantu para korban krisis kemanusiaan dengan memberikan bantuan melalui kapal kemanusiaan agar para korban bisa hidup lebih layak melalui bantuan yang diberikan (Wiwoho, 2018). Guna mendukung aksi tersebut PKS juga menginstruksikan seluruh kadernya guna memberikan bantuan suka rela terkait persoalan ini (Prasetia, 2018).

Sejalan dengan pernyataan sikap dan rencana aksi yang akan dilakukan, di hari yang sama dengan rilis pernyataan sikap yakni 3 September 2017, PKS juga membentuk Pusat Krisis (*Crisis Center*) terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Crisis center ini ditujukan untuk mencegah informasi palsu (*Hoax*) yang berkembang terkait persoalan kekerasan yang terjadi di Rakhine (Prasetia, 2018). Penyaringan informasi ini dirasa sangat penting untuk menentukan

rencana tindakan dan berguna untuk menjaga persatuan agar berita yang tersebar tidak mengarah pada kebencian antar agama. Beberapa hal yang disampaikan oleh PKS dapat dikategorikan sebagai pengaruh yang cukup berarti dengan memberikan rencana aksi yang konkret yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan langkah strategis sebagai sebuah kebijakan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP menyampaikan sikap awal terkait persoalan krisis kemanusiaan di Rakhine dengan melalui keterangan tertulis yang dilakukan oleh Sekjen PPP Asrul Sani pada Jumat 1 September 2017. Beliau menyebutkan bahwa PPP mendesak pemerintah RI untuk mengajak negara anggota ASEAN untuk melangkah lebih jauh dari kesepakatan ASEAN guna penyelesaian persoalan krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Prinsip tidak campur tangan di dalam tubuh ASEAN dianggap sudah tidak berlaku untuk kasus krisis kemanusiaan yang mengarah ke penghapusan etnis. Hal ini yang menjadi landasan PPP untuk mendesak pemerintah melakukan hal konkret terkait persoalan ini (Andika, 2018)

Pada keterangan tertulis yang berbeda yang disampaikan oleh ketua umum PPP Romahurmuziy pada Senin, 4

September 2017, beliau memaparkan apresiasi terhadap aksi diplomatik yang dilakukan Indonesia karena beberapa negara yang cukup konsentrasi terhadap persoalan ini tidak memiliki akses diplomatik yang baik untuk memperbincangkan persoalan ini dengan otoritas pemerintah Myanmar. Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah harus mempertahankan pola pendekatan diplomatik untuk menghentikan segala jenis bentuk kekerasan dan ketegangan yang terjadi di Rakhine State dan memastikan bahwa adanya perlindungan terhadap masyarakat sipil. Pemberian bantuan kemanusiaan terkait pangan dan akses kesehatan juga menjadi poin utama yang disampaikan Romi sebagai salah satu langkah strategis yang harus dilakukan Indonesia. Beliau juga menambahkan bahwa Indonesia perlu untuk melakukan usulan kepada dewan keamanan PBB untuk menempatkan tentara jaga damai di Rakhine untuk memastikan kondisi aman di Rakhine State (Waskita, 2018). PPP sangat mengapresiasi tindakan diplomatik yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pengaruh yang diberikan PPP lebih menekankan pada bentuk dan jenis bantuan yang harus segera direalisasikan Indonesia untuk memastikan bahwa aksi konkret Indonesia bukan hanya dalam tatanan

pendekatan diplomatik tapi juga merealisasikan aksi tersebut.

Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Partai Nasdem sebagai pemain baru di parlemen lebih bertindak kooperatif dalam respon yang dilakukan pemerintah dalam melakukan diplomasi kemanusiaan di Myanmar. Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung mengapresiasi langkah presiden RI yang memerintahkan Menlu untuk berangkat ke Myanmar guna mencari solusi komprehensif dalam penyelesaian krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Rakhine State. Langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Indonesia diharapkan dapat berdampak di berbagai bidang. Salah satunya DPP Nasdem mendorong pemerintah untuk dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan serta melakukan diplomasi Internasional guna penghentian kekerasan yang terjadi di Rakhine State (Tribun, 2018). Sikap kooperatif yang ditampakkan oleh partai Nasdem adalah sebuah bentuk dukungan terhadap aksi pemerintah dan penekanan terhadap bantuan kemanusiaan menjadi sebuah pengaruh yang diberikan partai Nasdem agar pemerintah dapat segera memberikan bantuan kemanusiaan ke etnis Rohingya.

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Partai Hanura melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP

menyampaikan sikap yang tegas terkait persoalan yang terjadi di Rohingya. Pernyataan sikap yang dilakukan oleh partai Hanura adalah dengan menyampaikan sembilan poin pernyataan sikap partai Hanura yang disampaikan pada tanggal 2 September 2017. Secara rinci pernyataan sikap partai Hanura peneliti letakkan pada bagian lampiran. Dari sembilan sikap yang disampaikan oleh LBH DPP Partai Hanura, Peneliti menemukan ada dua poin yang dapat dikategorikan pengaruh yang diberikan oleh partai Hanura dalam pengambilan kebijakan luar negeri terkait bantuan kemanusiaan Indonesia ke Rakhine dalam menanggulangi permasalahan krisis kemanusiaan yang terjadi. Poin kedua dalam pernyataan sikap tersebut antara lain adalah dengan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Aliansi kemanusiaan untuk Myanmar (AKIM) yang bergerak untuk membantu penyelesaian persoalan yang terjadi. Sedangkan di poin keempat, partai Hanura menyampaikan desakan terhadap pemerintah Indonesia untuk dapat berkontribusi nyata dalam penyelesaian persoalan yang terjadi sesuai dengan amanat UUD 1945 yang memandatkan Indonesia untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial (Pewartu, 2020).

Pemaparan terkait pengaruh yang diberikan oleh berbagai partai politik yang menjadi objek analisis peneliti, peneliti mencoba mengelompokkan pengaruh yang diberikan dalam dua skema yakni pengaruh yang

diberikan untuk membuat kebijakan bantuan kemanusiaan dan pengaruh lain di luar bantuan kemanusiaan Indonesia. Pengelompokan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Pengaruh Partai Politik

No	Parpol	Pengaruh Untuk Kebijakan Bantuan	Pengaruh lain
1	PDI Perjuangan	Mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan dan membantu penyelesaian Ikut andil dalam gerakan solidaritas	
2	Golkar	Melakukan langkah-langkah kongkret dalam membantu penyelesaian persoalan ini Memberikan bantuan kemanusiaan melalui Dompet Tragedi kemanusiaan Rohingya Partai Golkar	
3	Gerindra		Mendesak untuk melakukan pengusiran terhadap duta besar Myanmar Untuk Indonesia Indonesia menginisiasi dikeluarkannya Myanmar dari ASEAN Indonesia menggalang dukungan negara-negara lain untuk menekan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan persoalan Mencari tahu persoalan yang terjadi
4	Demokrat	Memaparkan apa yang dilakukan oleh presiden Jokowi dan Menlu yang sudah melakukan pernyataan yang bagus	Pemerintah harus mengambil prakarsa bersama pemimpin lain untuk mengakhiri krisis kemanusiaan. Mengajak ASEAN untuk mengatasi krisis kemanusiaan
5	PAN		Mengusir duta besar Myanmar untuk Indonesia
6	PKB	Menekan pemerintah Myanmar agar dapat membuka akses bantuan kemanusiaan	Membangun diplomasi yang efektif

		Menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk menggalang dana yang diambil dari gaji para kader dan pegawai PKB	PBB segera membuat <i>fact finding</i>
7	PKS	Fraksi PKS akan menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Rohingya Mendesak Presiden RI untuk melakukan tindakan dan upaya yang lebih nyata	Mendorong pemerintah RI untuk dapat melakukan diplomasi multitrack Membentuk Pusat Krisis (Crisis Center)
8	PPP	Apresiasi terhadap aksi diplomatik yang dilakukan Indonesia	Mendesak pemerintah RI untuk mengajak negara anggota ASEAN untuk melangkah lebih jauh dari kesepakatan ASEAN guna penyelesaian persoalan krisis kemanusiaan Indonesia perlu untuk melakukan usulan kepada dewan keamanan PBB untuk menempatkan tentara jaga damai
9	Nasdem	Mengapresiasi langkah presiden RI yang memerintahkan Menlu untuk berangkat ke Myanmar guna mencari solusi komprehensif dalam penyelesaian krisis kemanusiaan Mendorong pemerintah untuk dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan	Melakukan diplomasi Internasional guna penghentian kekerasan
10	Hanura	Mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Aliansi kemanusiaan untuk Myanmar (AKIM) Pemerintah Indonesia dapat berkontribusi nyata dalam penyelesaian persoalan yang terjadi sesuai dengan amanat UUD 1945	

Sumber : Diolah oleh Peneliti

KESIMPULAN

Berdasarkan sejumlah analisa yang dilakukan terkait sikap partai politik terhadap krisis kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar didapatkan temuan terkait pengaruh yang diberikan oleh partai politik cenderung mendesak pemerintah untuk segera bertindak nyata terkait krisis

kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State. Tindakan nyata yang diharapkan adalah dengan pola diplomasi untuk membuka akses bantuan kemanusiaan agar dapat tersalurkan kepada kelompok yang menjadi korban dalam krisis kemanusiaan tersebut. Delapan dari sepuluh partai politik memberikan pengaruh dan mendesak pemerintah untuk melakukan hal konkret

dan nyata. Empat partai politik yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB dan PKS juga siap memberikan kontribusi dalam memberikan bantuan kemanusiaan melalui penggalangan dana dari internal partai. Pengaruh lain yang diberikan adalah dengan mendesak pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan negara-negara lain baik itu di ruang lingkup ASEAN, PBB dan OKI untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Dua partai politik yakni Gerindra dan PAN tidak memberikan desakan terkait kebijakan bantuan kemanusiaan akan tetapi mereka lebih menekankan pada pengusiran duta besar Myanmar untuk Indonesia sebagai bentuk hukuman dan tindakan tegas pemerintah dalam menyikapi masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akun Twitter Resmi Partai Gerindra @Gerindra pada tanggal 4 september 2017 pukul 08.07 - 08.13
- Albayumi, Fuat, Nourma Meysita Hadi, Djoko Susilo. 2017. Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017. *Nation State: Journal of International* Vol. 1 No.1.
- Aulia, M. Rodhi. PKS Minta Pemerintah Bersikap Terkait Aksi Kekerasan di Rohingya. 2017. Diakses melalui < <http://news.metrotvnews.com/politik/zNPd7BzN-pks-minta-pemerintah-bersikap-terkait-aksi-kekerasan-di-rohingya>> pada 01/10/2018
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fazli, Achmad Zulfikar. Ini Daftar Perolehan Kursi DPR RI Tiap Parpol. 2014 diakses melalui < <http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/14/241830/ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol> > pada 28/09/2018
- Ihsanuddin. PDI-P Apresiasi Menlu Terbang ke Myanmar untuk Bantu Rohingya. 2017 diakses melalui < <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/07390781/pdi-p-apresiasi-Menlu-terbang-ke-myanmar-untuk-bantu-Rohingya>> pada 28/09/2018
- Iskandar. *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (Kualitatif dan kuantitatif)*. Gaung Persamda Press, Jakarta. 2008. Hal.186
- Ismail, Taufik. PKB Minta Pemerintah Dorong PBB Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Rohingya. 2017 Diakses melalui < <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/03/pkb-minta-pemerintah-dorong-pbb-bentuk-tim-pencari-fakta-kasus-Rohingya>> pada 01/10/2018
- Liputan6.com. PDI Desak Pemerintah Bantu Selesaikan Konflik Rohingya. 2017 diakses melalui < <https://www.liputan6.com/news/read/3080350/pdi-desak-pemerintah-bantu-selesaikan-konflik-Rohingya> > pada 28/09/2018
- Liputan6.com. SBY Desak Aung San Suu Kyi Segera BERTINDAK Atasi Krisis Rohingya. 2017 diakses melalui < <https://www.liputan6.com/news/read/3080398/sby-desak-aung-san-kyi-segera-bertindak-atasi-krisis-rohingya> >

- [suu-kyi-segera-bertindak-atasi-krisis-Rohingya](#)> pada 01/10/2018
- Medistiara, Yulida. Demoktat : RI Harus jadi Leading Brother atasi keisis di Mynamar. 2017 diakses melalui <https://news.detik.com/berita/3626926/demokrat-ri-harus-jadi-leading-brother-atasi-krisis-di-myanmar> pada 01/10/2018
- Okezone. Protes Terhadap Tragedi Rohingya, Gerindra Minta Pemerintah Segera Tarik Dubes Indonesia untuk Myanmar. 2017 diakses melalui < <https://news.okezone.com/read/2017/09/04/337/1768680/protes-terhadap-tragedi-Rohingya-gerindra-minta-pemerintah-segera-tarik-dubes-indonesia-untuk-myanmar>> pada 28/09/2018
- Pewarta News. Kasus Rtnis Rohingya, Ini 9 Sikap LBH Partai Hanura. 2017 diakses melalui < **Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.**> pada 02/10/2018
- PKS. Pernyataan Sikap DPP PKS Tentang Pembersihan Etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. 2017 diakses melalui < <http://pks.id/content/pernyataan-sikap-dpp-pks-tentang-pembersihan-etnis-Rohingya-di-rakhine-myanmar> > pada 01/10/2018
- Prasetia, Andhika. PPP Desak ASEAN DAN RI Bantu AtasiMasalah Etnis Rohingya. 2017 diakses melalui < <https://news.detik.com/berita/3624848/ppp-desak-asean-dan-ri-bantu-atasi-masalah-etnis-Rohingya>> pada 01/10/2018
- Prasetia, Andika. Bantu Etnis Rohingya, PKS Galang Dana dan Bentuk Crisis Center. 2017 diakses pada < <https://news.detik.com/berita/d-3626907/bantu-etnis-Rohingya-pks-galang-dana-dan-bentuk-crisis-center>>
- Prastiwi, Devira. PKB Kutuk Tindakan Militer Myanmar ke Rohingya. 2017 diakses melalui < <https://www.liputan6.com/news/read/3080408/pkb-kutuk-tindakan-militer-myanmar-ke-Rohingya>> pada 01/10/2018
- Prihantoro, Anom. PBNU, Kemenlu, lintas ormas bentuk aliansi untuk Rohingya. 2017 diakses melalui (<https://www.antaraneews.com/berita/649997/pbnu-kemenlu-lintas-ormas-bentuk-aliansi-untuk-rohingya>) pada 28/05/2021
- Putra, Roki Eka. Sikapi Rohingya, Gerindra kumpulkan Data dan Fakta Untuk Masukan ke Pemerintah. 2017 diakses melalui < [http://rri.co.id/ternate/post/berita/431889/daerah/sikapi Rohingya geri ndra kumpulkan data dan fakta u ntuk masukan ke pemerintah.html](http://rri.co.id/ternate/post/berita/431889/daerah/sikapi_Rohingya_gerindra_kumpulkan_data_dan_fakta_u ntuk_masukan_ke_pemerintah.html) > pada 28/09/2018
- Ronald. 9 Sikap Partai Golkar terhadap Tragedi Kemanusiaan di Rohingya. Diakses melalui < <https://www.merdeka.com/politik/9-sikap-partai-golkar-terhadap-tragedi-kemanusiaan-di-Rohingya.html> > pada 28/09/2018
- Sindonews.com. Salut! PKS Bentuk Crisis Center Tragedi Kemanusiaan Rohingya, Ini Tujuannya. 2017 diakses melalui < <https://news.okezone.com/read/2017/09/04/337/1768743/salut-pks-bentuk-crisis-center-tragedi-kemanusiaan-Rohingya-ini-tujuannya>> pada 01/10/2018

- Sutari, Tiara. Tragedi Rohingya, BM PAN Minta Dubes Myanmar Angkat kaki. 2017 diakses melalui <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904093633-20-239232/tragedi-Rohingya-bm-pan-minta-dubes-myanmar-angkat-kaki>> pada 01/10/2018
- Tempo.co. Muhaimin Minta Kader PKB Sumbangkan Gajinya Bantu Warga Rohingya. 2017 diakses melalui <<https://nasional.tempo.co/read/905614/muhaimin-minta-kader-pkb-sumbangkan-gajinya-bantu-warga-Rohingya/full&view=ok>> pada 01/10/2018
- Tribunnews.com. NasDem Apresiasi Presiden Utus Menlu ke Myanmar. 2017 diakses melalui <<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/04/nasdem-apresiasi-presiden-utus-Menlu-ke-myanmar>> pada 01/10/2018
- Waskita, Ferdinand. Tragedi Rohingya, PPP Dorong penempatan Tentara Perdamaian di Rakhine State Myanmar. 2017 Diakses melalui <<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/04/tragedi-Rohingya-ppp-dorong-penempatan-tentara-perdamaian-di-rakhine-state-myanmar>> pada 01/10/2018
- William, D. Coplin, *Introduction to International politics : a theoretical overview*. Dialih bahasa oleh Marsedes Marbun, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis. Penerbit Sinar Baru Algensindo. Bandung. 2003)
- Wiwoho, Bimo. PKS Sarankan Jokowi Fasilitasi Bantuan untuk Rohingya. 2017 diakses melalui <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904015930-20->

[239196/pks-sarankan-jokowi-fasilitasi-bantuan-untuk-Rohingya](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904015930-20-239196/pks-sarankan-jokowi-fasilitasi-bantuan-untuk-Rohingya)>